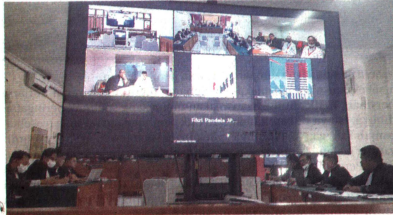




Rekom 40 Meter Cacat Prosedur



BUKTIKAN KONGKALIKONG: Persidangan kasus suap IMB Apartemen Royal Kedhaton yang melibatkan mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti secara hybrid di Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (1/11).

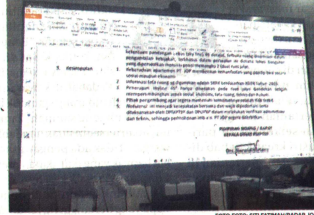


FOTO FOTO: BIRI FATMANURRAGAR JOGJA

Penambahan Ketinggian IMB Royal Kedhaton

JOGJA, Radar Jogja - Sidang kasus suap izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) Jogja. Persidangan terus membuktikan *kongkalikong* yang dilakukan mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS), Triyanto Budi Yuwono, dan Nurwidhiartana. Salah satunya, rekomendasi penambahan ketinggian bangunan yang cacat prosedur oleh HS saat menjabat wali kota

► *Elcca Rekom...* Hal 7



GRAFIK: HENRI KARTUNURRAGAR JOGJA

REKOMENDASI NO 640/2698

Tertanggal 4 Juli 2019

Haryadi Suyuti merekomendasikan pembangunan apartemen dengan ketinggian maksimal **40 meter**

Padahal dalam Surat Keterangan Rencana Kota (SKRKK) Jogja, tercantum ketinggian bangunan maksimal **32 meter**

JOP meminta agar IMB-nya diloloskan dengan ketinggian 40 meter. Rapat sampai dilakukan 2 kali, khusus membahas IMB apartemen Royal Kedhaton yang rencananya dibangun di Jalan Gandekan Lor RT 049 RW 14, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Jogja.

Desain Apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro tersebut:

Rekom 40 Meter Cacat Prosedur

Sambungan dari hal 1

Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat saksi dalam persidangan *hybrid* kemarin (1/11). Tiga orang di antaranya minggu kemarin sudah datang. Namun pemeriksannya belum rampung. Mereka adalah PNS di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kota Jogja Pamungkas, mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jogja Eko Suharto, dan

Kepala DPTR Kota Jogja Wahyu Handoyo. Satu orang lagi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja Sri Heru Wuryantara alias Gatot. Persidangan dimulai dengan pemeriksaan saksi Pamungkas oleh PU KPK. Dia menyatakan, sempat dipanggil oleh kepala dinas, berkaitan pemenuhan permintaan IMB Apartemen Royal Kedhaton oleh Java Orient Properti (JOP) segera rampung.

"Seingat kami, kepala DPTR tanya ke saya, tentang kemungkinan penarubahan ketinggian bangunan pada lokasi tersebut (IMB Apartemen Royal Kedhaton, *Red*). Kadin menyampaikan ada permissaan (dari JOP, *Red*)," ujarnya. Pamungkas mengatakan, sesuai Surat Keterangan Rencana Kota (SKRKK) Jogja, ketinggian bangunan maksimal 32 meter. Namun, JOP meminta agar IMB-nya diloloskan dengan ketinggian 40 meter. Rapat sampai dilaku-

kan tiga kali, khusus membahas IMB apartemen yang rencana dibangun di Jalan Gandekan Lor RT 049 RW 14, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Jogja ini. PU KPK kemudian menanyakan tentang rekomendasi penambahan ketinggian bangunan yang dikeluarkan oleh HS. Dalam rekomendasi No 640/2698 tertanggal 4 Juli 2019 itu, HS merekomendasikan pembangunan apartemen dengan ketinggian maksimal 40 meter.

Pamungkas lantas menyatakan, dinasnya tidak menggunakan rekomendasi HS dalam mengeluarkan keputusan. Dalam sebuah rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Jogja, bahkan DPTR hanya dilewati pendapatnya. PU KPK kemudian menegaskan, alasan dibuatnya rekomendasi penambahan ketinggian bangunan oleh wali kota. Pamungkas sempat berkelit bahwa yang memanfaatkan rekomendasi itu adalah DPUPKP Kota Jogja. Hinggal Pamungkas didesak oleh PU

KPK bahwa rekomendasi itu adalah cacat dan tidak sesuai aturan. "Pemahaman kami seperti itu," jawab Pamungkas kemudian. Dalam rapat 8 Maret 2022, Pamungkas juga menyebut ada poin yang tidak dibahas. Tapi poin itu dicantumkan dalam notulensi. Poin itu berbunyi, "Pihak pengembang agar segera memenuhi komitmennya setelah IMB terbit." Notulensi ditandatangani Nurwidhiartana selaku kepala Dinas PMPTSP. Sementara Kepala DPTR Kota Jogja Wahyu Handoyo mengaku

tidak pernah hadir dalam undangan rapat membahas IMB Apartemen Royal Kedhaton. Dia selalu men-disposisi kehadiran kepada Pamungkas. Bahkan ketika Wahyu mendapat pesan Jangsung dari Triyanto untuk datang ke Ruang Rapat Wali Kota Jogja. "Tidak tahu detail (pembahasan rapat, *Red*). Pernah dengar ada masalah sampai rapat di ruang Wali Kota Jogja, memutuskan nggak hadir. Pernah dengar membahas masalah perizinan, kepala PUPKP pusing," ungkapnya. (*fat/laz/fj*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005